

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Batam merupakan Kota terbesar yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dengan luas wilayah kota sebesar 3.868,97km² dengan luas wilayah darat 23% dan luas perairan sebesar 77%. Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014, terletak antara : 0o 25' 29'' LU 1o 15'00'' LU 103o 34' 35'' BT 104o 26'04''BT, sebelah Utara wilayah kota Batam berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Daik-Lingga, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karimun dan sebelah Timur berbatasan dengan Ibukota Provinsi Kepulauan Riau yaitu Tanjung Pinang (BPS Kota Batam, 2023).

Wilayah daerah pulau Batam pertama kali dihuni oleh orang melayu yang disebut orang selat yang berprofesi sebagai penangkap ikan dan bercocok tanam namun tidak banyak mengubah daerah Batam yang dahulu merupakan hamparan hutan belantara. Daerah Batam pernah menjadi tempat berlangsungnya perjuangan Laksamana Hang Nadim dalam melawan penjajah ini digunakan oleh pemerintah pada dekade 1960-an sebagai basis logistik minyak bumi di Pulau Sambu. Pada tahun 1970 daerah pulau Batam dibangun dan dirancang sebagai lingkungan kerja daerah industri sebagai basis logistik dan operasional untuk industri minyak dan gas bumi oleh Pertamina yang didukung oleh Badan Pengembangan (BP Batam) dengan tujuan menjadikan kota Batam sebagai Singapura nya Indonesia.

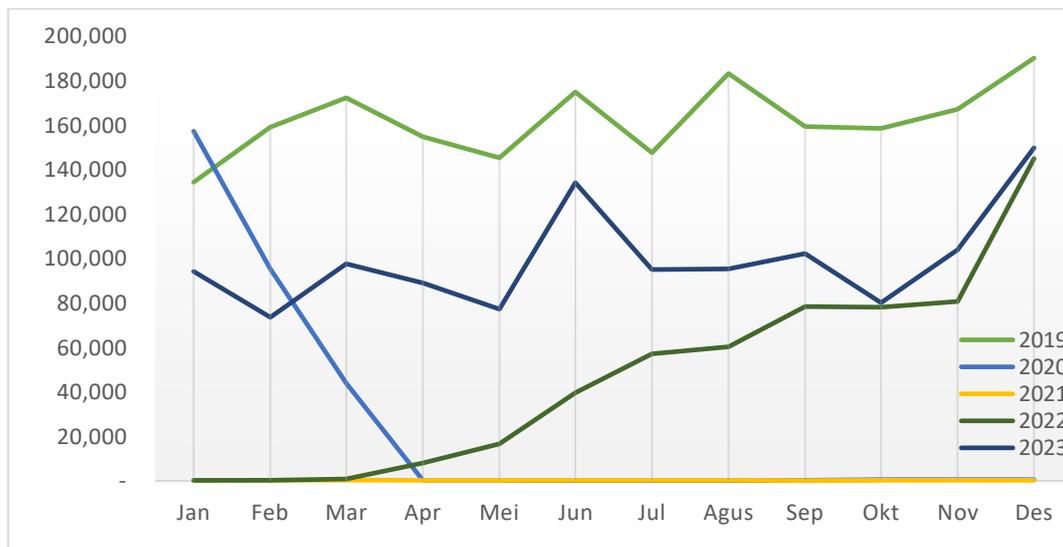
Karakteristik Wilayah kota Batam terletak di antara selat Malaka ini memiliki keunikan tersendiri karena banyak pulau-pulau kecil yang tersebar hingga 3 pulau besar yaitu Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang yang saat ini telah terkoneksi dengan jembatan Borelang (Batam-Rempang-Galang) yang selesai dibangun pada tahun 1998 diprakarsai oleh Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie. Jembatan yang dijuluki "*Golden Gate*" Indonesia peninggalan BJ Habibie ini memiliki tujuan untuk mengoptimalkan kinerja Badan Otorita Batam

(tahun 2007 diubah menjadi Badan Pengusahaan/BP Batam) serta Jembatan Barelang menjadi Objek wisata utama di Kota Batam.

Secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis yaitu berada di jalur pelayaran dunia yang menjadikan Kota Batam sebagai pintu utama perdagangan Internasional. Kota Batam merupakan salah satu daerah yang memiliki kawasan ekonomi khusus dan kondisi Geografis sangat strategis yang dekat dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Posisi strategis ini tidak hanya menarik perusahaan-perusahaan besar namun juga dapat menarik wisatawan nasional maupun internasional. Pesatnya laju perdagangan dan wisata diiringi dengan perkembangan Infrastruktur membuat kota menjadi salah satu kota yang memiliki perkembangan tercepat di Indonesia.

Kota Batam memiliki pesona alam tropis yang eksotis dan indah yang menjadikan wilayah ini kedatangan banyak wisatawan lokal maupun mancanegara. Wisatawan mancanegara yang datang dapat menghabiskan waktu di Pantai, vila, dan *resort*. Tidak hanya menawarkan pesona alam yang indah kota Batam juga menjadi target wisatawan dalam berbelanja barang-barang yang memiliki harga yang murah seperti pakaian, tas, alat kecantikan, sepatu, parfum hingga barang elektronik. Batam salah satu wilayah yang masuk dalam Kawasan Perdagangan Bebas Indonesia. Kawasan ini membebaskan bea masuk, pajak pertambahan nilai dan cukai pada barang-barang Impor dari luar negeri. Kawasan perdagangan bebas ini membuat harga barang-barang lebih rendah dan murah karena tidak dikenakan pajak impor.

Publikasi tahunan Badan Pusat Statistik yang diperoleh dari Direktorat Jendral Imigrasi Batam menempati urutan ketiga kota dengan jumlah wisatawan mancanegara terbanyak di Indonesia. Pada tahun 2022, Batam menerima 338.200 kedatangan wisatawan mancanegara.



Gambar 1. 1
Perkembangan Kunjungan Wisatawan

Asing ke Kota Batam 2019-2023

Sumber : (BPS Kota Batam, 2023)

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat terjadi kenaikan yang signifikan selama tahun 2022, selama bulan November 2022 jumlah wisatawan tercatat sebanyak 80.667 kunjungan atau terjadi kenaikan selama satu tahun sebelumnya pada November 2021 dengan jumlah kunjungan yang naik sebesar 34.373,08%. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2020-2021 disebabkan oleh Covid-19 yang mempengaruhi berbagai industri termasuk industri pariwisata. Namun pada tahun 2022 seiring dengan meredanya pandemi juga diikuti dengan membaiknya sektor industri pariwisata yang ditandai dengan kembali naiknya perkembangan kunjungan wisatawan. Bisa terlihat pada tahun 2023 perkembangan wisatawan naik signifikan hingga tercatat 149.853 kunjungan pada bulan Desember 2023. Namun tingkat kunjungan wisatawan setelah era pandemi Covid-

19 ini belum dapat menyamai kunjungan wisatawan sebelum era pandemi yaitu pada tahun 2019 dengan jumlah wisatawan tercatat sebanyak 190.232 kunjungan.

Wisatawan yang berkunjung di dominasi oleh wisatawan mancanegara berkebangsaan Singapura sebanyak 95.736 kunjungan yang mendominasi sebesar 63,89% dari total seluruh kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk ke kota Batam dengan Malaysia yang jumlahnya sebanyak 23.907 kunjungan atau 15,95% dari total kunjungan wisman ke Kota Batam, dari total seluruh kunjungan wisatawan. Sementara itu kunjungan wisatawan mancanegara lainnya seperti wisatawan berkebangsaan India, China, Filipina, Inggris, Amerika Serikat, Australia dan Jerman.

Upaya Pemerintah daerah kota Batam dalam menjalankan Pembangunan Infrastruktur dan kegiatan-kegiatan Pemerintah yang efektif dan efisien agar tercapainya pengoptimalan kesejahteraan kepada masyarakatnya tentu saja memerlukan biaya dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah menggunakan semua sumber daya yang dimiliki Pemerintah daerah.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kota Batam merupakan salah satu pelaksana penyelenggaraan pemerintahan yang bergerak di bidang keuangan. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) didirikan berdasarkan amanat PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian diperkuat dengan Perda Kota Batam No.10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bapenda Batam, atau Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Batam mengalami perubahan nama pada 4 Februari 2021 setelah sebelumnya bernama Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), perubahan ini terjadi setelah Pemko Batam dan DPRD Batam menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah Kota Batam Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah menjadi peraturan daerah (PERDA).

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam pengelolaan Pendapatan asli daerah, adapun yang menjadi kewenangan dalam PAD yaitu Penerimaan Pajak

Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD dan Pendapatan lain-lain yang sah. Kewenangan dan tugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam merupakan unsur pelaksanaan pada Visi dan Misi Pemerintahan Kota Batam.

Badan Pendapatan Daerah kota Batam menggunakan Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar yang dikelola untuk terus meningkatkan pelaksanaan pemberian layanan kepada Masyarakat dan Pertumbuhan ekonomi daerah yang berasal dari sumber-sumber Pendapatan asli daerah (PAD). Berikut sumber-sumber penerimaan khususnya dari pajak daerah

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan umum
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Dengan segala karakteristik dan keuntungan geografis kota Batam menarik perhatian para wisatawan asing, terbukti dari volume pengunjung internasional yang tinggi seperti yang ditampilkan pada gambar 1.1 sehingga kota Batam memiliki prospek yang baik untuk menjadi kota pariwisata. Peningkatan Pendapatan dari sektor pariwisata kota Batam termasuk pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame memiliki potensi pertumbuhan positif yang diharapkan akan terus berkembang sejalan dengan peningkatan infrastruktur. Hal ini menjadi indikator penting bagi Kemandirian keuangan daerah kota Batam, oleh karena itu diperlukan penelitian tentang Kemandirian Keuangan daerah yang didukung oleh faktor yang mempengaruhinya yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame pada objek penelitian ini yaitu kota Batam.

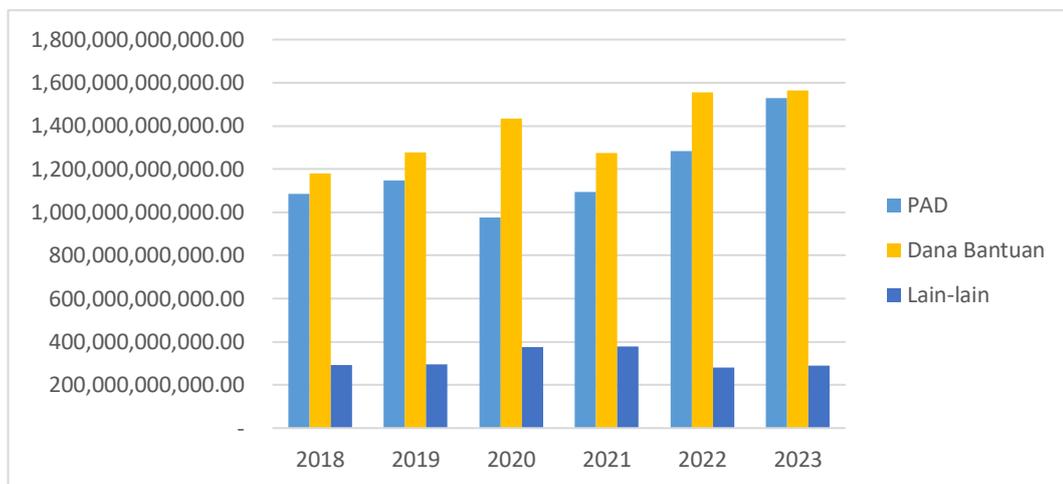
1.2 Latar Belakang Penelitian

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan utama daerah yang akan digunakan untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan pembangunan dan sumber dana untuk kesejahteraan Masyarakat (Ambarsari et al., 2019), serta dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah memiliki wewenang menggali sumber daya yang dimiliki dan mengatur segala urusan yang terdapat di daerahnya. Kemandirian daerah ini merupakan salah satu dari tujuan Otonomi Daerah.

Otonomi daerah diberikan sebagai wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Menurut (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014) menyebutkan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Otonomi dilakukan karena wilayah Indonesia yang sangat luas sehingga diperlukannya pembagian wewenang kepada daerah, pembagian kekuasaan ini dapat mengurangi pengelolaan kekuasaan secara sentralistis yang mengakibatkan pemerintah dihadapkan permasalahan yang begitu kompleks sehingga mustahil untuk ditangani sendiri. Pemberian kewenangan kepada unit-unit pemerintah yang lebih rendah dan lebih kecil merupakan suatu kebutuhan oleh pemerintah untuk menjangkau hingga seluruh lapisan masyarakat. Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang sesuai dengan bunyi UUD 1945 “Untuk memajukan kesejahteraan umum”. kemajuan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam mengembangkan pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, adil, keistimewaan dan kemajemukan daerah yang terdapat di Indonesia.

Pajak merupakan pendapatan asli dari daerah yang menjadi sumber dana bagi daerah (Asalam & Annisa, 2022). Negara sangat bergantung pada pajak sebagai sumber pendapatan untuk membayar biaya sehari-hari dan Pembangunan nasional (Rahmawati & Gani Asalam, 2022). Optimalnya penerimaan pajak yang berkaitan dengan pariwisata akan berdampak dalam meningkatnya pajak hotel,

pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame yang tentu juga berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah. Maksimalnya pendapatan asli daerah tentu akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah sehingga pengoptimalan kegiatan pemerintahan mampu diselenggarakan dengan menggunakan sumber pendapatan asli daerah tanpa mengandalkan bantuan dana dari Pemerintah pusat dan Pemerintah provinsi. Tingkat kemandirian keuangan daerah kota Batam sudah dalam kategori tinggi namun dana bantuan dari dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi masih mendominasi pendapatan daerah kota Batam.



Gambar 1. 2

Kontribusi Pendapatan Kota Batam 2018-2023

Sumber : DJPK, Data Diolah Penulis

Dari gambar 1.2 diatas dapat dilihat bahwa pendapatan kota Batam masih didominasi oleh dana bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Pada tahun 2018 penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp1.084.640.000.000 dana bantuan sebesar Rp1.179.630.000.000 dan dana lain-lain sebesar Rp291.580.000.000, Pada tahun 2019 penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp1.147.690.000.000 dana bantuan sebesar Rp1.277.890.000.000 dan dana lain-lain sebesar Rp295.490.000.000, Pada tahun 2020 penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp975.280.000.000 dana bantuan sebesar Rp1.433.000.000.000 dan dana lain-lain sebesar Rp376.600.000.000, Pada tahun 2021 penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp1.094.020.000.000 dana bantuan sebesar Rp1.275.530.000.000 dan dana lain-lain sebesar Rp377.650.000.000, Pada tahun

2022 pendapatan asli daerah mengalami kenaikan sebesar Rp1.282.190.000.000 dana bantuan juga mengalami kenaikan sebesar Rp1.554.056.000.000 dan dana lain-lain sebesar Rp280.590.000.000, Pada tahun 2023 pendapatan asli daerah mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp1.529.954.917.000 dana bantuan juga mengalami kenaikan sebesar Rp1.565.020.000.000 dan dana lain-lain sebesar Rp288.470.000.000.

Dapat dikatakan bahwa struktur pendapatan daerah kota Batam pada tahun 2018-2023 belum dikatakan daerah yang sepenuhnya mandiri karena penerimaan masih didominasi oleh dana bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Ini menunjukkan bahwa kota Batam masih bergantung kepada Dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.



Gambar 1. 3

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Batam 2018-2023

Sumber : Data diolah oleh Penulis

Berdasarkan gambar 1.3 yang terdapat diatas dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun 2018 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp197.479.031.420.020. Pada tahun 2019 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp88.761.601.754.080. Pada tahun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp178.580.714.387.210. Penurunan terjadi disebabkan oleh meningkatnya pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak kembali naik sebesar Rp 40.772.939.963.410. Pada tahun 2022 penerimaan pajak

mengalami kenaikan drastis sebesar Rp237.329.757.707.460. Pada tahun 2023 penerimaan pajak mengalami kenaikan kembali sebesar Rp191.949.054.362.370. Kenaikan pada tahun 2023 menjadi realisasi penerimaan pajak tertinggi yang diperoleh oleh pemerintahan kota Batam sebesar Rp1.225.929.945.443.000.

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi penerimaan Pajak dari sektor Pariwisata
Kota Batam 2020-2023

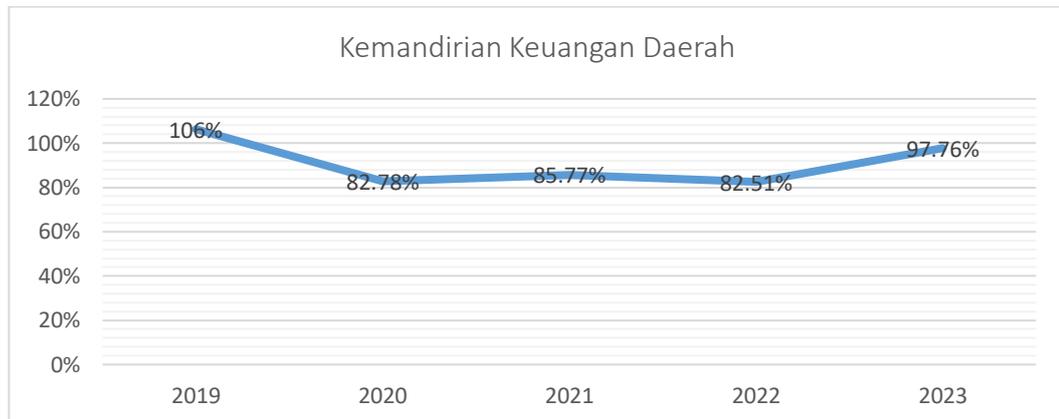
Tahun Anggaran	Pajak Hotel	Persentase %	Pajak Restoran	Persentase %
Target 2020	65,041,777,000.00	68%	77,667,214,000.00	86%
Realisasi 2020	44,398,892,403.41		66,979,995,012.94	
Target 2021	49,237,228,000.00	79.46%	73,185,115,000.00	87.29%
Realisasi 2021	39,121,715,865.07		63,885,350,322.69	
Target 2022	127,750,000,000.00	66.33%	129,224,462,013.00	73.57%
Realisasi 2022	84,740,006,009.87		95,073,526,838.43	
Target 2023	134,763,757,542.00	32.95%	152,666,481,617.00	43.87%
Realisasi 2023	44,398,892,403.41		66,979,995,012.94	
Tahun Anggaran	Pajak Hiburan	Persentase %	Pajak Reklame	Persentase %
Target 2020	21,785,589,000.00	71%	8,788,103,000.00	97%
Realisasi 2020	15,385,878,503.99		8,483,125,000.00	
Target 2021	15,500,608,000.00	69.22%	10,106,673,000.00	90.55%
Realisasi 2021	10,730,059,900.89		9,151,833,000.00	
Target 2022	38,233,233,191.00	63.45%	12,500,000,000.00	64.96%
Realisasi 2022	24,259,965,806.34		8,119,832,000.00	
Target 2023	53,080,370,622.00	28.99%	20,066,617,129.00	42.27%
Realisasi 2023	15,385,878,503.99		8,483,125,000.00	

Sumber : Data Diolah oleh Penulis

Upaya untuk meningkatkan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Anjanni et al., 2019). Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa Persentase realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame dari tahun 2020-2023 yang dipungut tidak ada yang melebihi target yang diberikan oleh pemerintah daerah kota Batam. Persentase Realisasi penerimaan pajak masih berada dibawah 100% yang dapat diartikan bahwa penerimaan pajak yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah masih belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Penerimaan Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame tidak

maksimal dan optimal karena pelaksanaan penerimaan belum dilakukan dengan baik oleh pemerintah daerah kota Batam. Pajak daerah memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah dengan menyediakan sumber pendanaan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah sehingga optimalisasi penerimaan pajak menjadi salah satu pendapatan yang diandalkan pemerintah daerah untuk menghimpun pendapatan dengan optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah (Wibisono et al., 2023). Ini perlu menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan sektor penerimaan daerah khususnya penerimaan pajak dari sektor pariwisata.

Sektor Pariwisata menjadi sektor yang berpotensi besar dalam mengembangkan keuangan daerah, Muhammad Rudi selaku kepala BP Batam di dalam wawancaranya mengatakan bahwa “pengembangan sektor pariwisata ini perlu dilakukan karena kondisi geografis yang dimiliki oleh Batam membuat kota ini layak dijadikan sebagai daerah pariwisata sebagai salah satu potensi yang sangat berharga, kota Batam diproyeksikan akan semakin maju dan berkembang dengan pesat jika sektor pariwisata dikelola dengan baik”. Sektor perekonomian kota Batam di topang oleh 3 sektor utama, yaitu: industri manufaktur, konstruksi dan perdagangan sesuai wawancara Jefridin Hamid selaku Sekretaris Daerah (Sekda) kota Batam di dalam wawancaranya di MC Pemko (MEDIACENTER, 2022). Sektor Industri masih menjadi fokus Pembangunan dari pemerintah karena menjadi sektor yang memberikan kontribusi penerimaan pendapatan terbesar. kota Batam yang memiliki segala potensi besar dalam sektor pariwisata sebagai salah satu sektor perekonomian utama dalam pengelolaan dan Pembangunan pemerintah kota Batam. Kota Batam memiliki peluang besar untuk menjadi daerah yang mandiri jika pemerintah dapat memanfaatkan potensi besar pariwisata sebaik-baik mungkin.



Gambar 1. 4
Pertumbuhan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah kota Batam
Tahun 2019-2023

Sumber : Data diolah oleh penulis

Dari gambar 1.4 diatas dapat dilihat tingkat kemandirian keuangan daerah kota Batam 5 tahun terakhir terjadi fluktuasi. Tahun 2019 tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 106%, pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis dari tahun sebelumnya sebesar 82%, Pada tahun 2021 tingkat kemandirian keuangan daerah kota Batam meningkat sebesar 85%, pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan sebesar 82%, pada tahun 2023 meningkat sebesar 97%. Fluktuasi dari tingkat kemandirian keuangan daerah dapat menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan anggaran daerah. Pakar sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Bambang Juanda menyebutkan ”Tingkat kemandirian keuangan daerah yang fluktuatif disebabkan oleh belum mampunya daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah” (Muhammad Zulfikar, 2021). Adanya ketidakpastian dalam perencanaan anggaran daerah ini bisa mengakibatkan proyek-proyek pembangunan tertunda atau bahkan dibatalkan karena kurangnya kestabilan dana daerah.

Tujuan desentralisasi fiskal yang dilaksanakan untuk mempermudah pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan mengendalikan penggunaan dana yang bersumber dari kekayaan asli daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan utama daerah. Kemampuan daerah untuk memenuhi

tujuan tersebut disebut dengan kinerja keuangan pemerintah daerah (Wibisono et al., 2023). Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, dapat diukur menggunakan salah satu cara yaitu dengan menggunakan analisis rasio keuangan APBD yang telah ditetapkan. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat diukur berdasarkan perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan bantuan pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman (Mahmudi, 2019). Tingkat kemandirian keuangan daerah mengalami fluktuasi karena penerimaan realisasi pajak daerah yang dilaksanakan pemerintah tidak maksimal. Hal ini dapat mengakibatkan infrastruktur dan kegiatan layanan kepada masyarakat tertunda atau bahkan dibatalkan karena kurangnya kestabilan dana daerah.

Menurut (Saraswati & Nurharjanti, 2021) menjelaskan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Menurut (Rahman & Altin, 2023) pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan daerah. Dari uraian diatas masih ditemukan Inkonsisten terhadap hasil penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu menggunakan Pendapatan asli daerah dan Pajak Daerah sebagai variabel sedangkan keterbaruan pada penelitian ini berasal dari sektor pariwisata yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian atas penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame kota Batam yang diambil dari tahun 2020 sampai tahun 2023.

Berdasarkan fenomena dan inkonsistensi tersebut dapat dilihat bahwa pajak daerah yang berkaitan dengan sektor pariwisata menjadi faktor penting dalam perkembangan dan peningkatan pendapatan daerah bagi Kemandirian Keuangan daerah pada Kota Batam. Sehingga penulis memilih untuk mengambil judul **“Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”**.

1.3 Perumusan Masalah

Tingkat kemandirian keuangan suatu daerah dapat mencerminkan ketergantungan pemerintah daerah dalam hal keuangan pada pemerintah pusat (Novianti & Apriliawati, 2022). Tingginya rasio kemandirian keuangan menandakan ketergantungan daerah pada pemerintah pusat, rendahnya indikator

yang mencerminkan kemampuan daerah untuk menjalankan tujuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Di era otonomi ini diharapkan daerah menjadi mandiri di dalam pengelolaan kewenangannya yang ditandai dengan menguatnya kapasitas fiskal yang membuat daerah tidak bergantung pada pemerintahan yang lebih tinggi. Peneliti memilih kota Batam dari tahun 2020-2023 sebagai objek penelitian karena tingkat kemandirian keuangan daerah kota Batam sudah tinggi namun struktur pendapatan kota masih bergantung kepada Dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah masih belum stabil. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan oleh peneliti diatas, dapat diperoleh beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Perumusan masalah dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut;

- 1) Bagaimana Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Kemandirian Keuangan Daerah kota Batam tahun 2020-2023?
- 2) Apakah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame secara simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan daerah kota Batam tahun 2020-2023?
- 3) Apakah Pajak Hotel berpengaruh secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan daerah di kota Batam tahun 2020-2023?
- 4) Apakah Pajak Restoran berpengaruh secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan daerah di kota Batam tahun 2020-2023?
- 5) Apakah Pajak Hiburan berpengaruh secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan daerah di kota Batam tahun 2020-2023?
- 6) Apakah Pajak Reklame berpengaruh secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan daerah di kota Batam tahun 2020-2023?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui tingkat penerimaan pajak Hotel, pajak Restoran, pajak Hiburan, pajak Reklame dan tingkat kemandirian keuangan daerah kota Batam tahun 2020-2023.

- 2) Untuk mengetahui pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame secara simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kota Batam tahun 2020-2023.
- 3) Tingkat penerimaan Pajak Hotel secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan daerah kota Batam tahun 2020-2023.
- 4) Tingkat penerimaan Pajak Restoran secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan daerah kota Batam tahun 2020-2023.
- 5) Tingkat penerimaan Pajak Hiburan secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan daerah kota Batam tahun 2020-2023.
- 6) Tingkat penerimaan Pajak Reklame secara parsial terhadap Kemandirian Keuangan daerah kota Batam tahun 2020-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti dalam aspek teoritis yaitu diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu penulis terhadap pajak dan implementasi teori perpajakan serta penulis dapat menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Pajak.

1.5.2 Aspek Praktis

Manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti dalam aspek Praktis yaitu sebagai berikut.

- 1) Bagi Pemerintah kota Batam : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam membuat kebijakan terkait pengoptimalan penerimaan pajak daerah khususnya pada sektor pariwisata untuk meningkatkan tingkat Kemandirian Keuangan daerah.
- 2) Bagi BAPENDA kota Batam : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi analisis Pajak daerah dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan Kinerja Pemerintah daerah dalam mengelola Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame.
- 3) Bagi Wajib Pajak : Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib Pajak akan pentingnya penerimaan pajak untuk lebih taat membayar

Pajak khususnya Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

1) BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang mengenai gambaran umum objek penelitian yaitu kota Batam periode tahun 2020-2023, latar belakang penelitian yang berisi fenomena, perumusan masalah yang diteliti berdasarkan latar belakang penelitian, tujuan penelitian manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis serta sistematika penulisan tugas akhir.

2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang *grand theory* yang digunakan beserta teori yang relevan dengan kemandirian keuangan daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame yang berhubungan dengan topik penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian dan ruang lingkup penelitian.

3) BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dan teknik yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, variabel dependen (y) dan independen (x), tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan teknik analisis kuantitatif.

4) BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan secara kronologis dan sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian. Setiap bagian pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data yang kemudian diinterpretasikan.

5) BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang

dilakukan. Pada bab ini juga terdapat saran yang ditujukan kepada pemerintah kota Batam dan wajib pajak serta terkait dengan hasil penelitian untuk penelitian selanjutnya.